

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN  
BERDASARKAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2019**

Oleh:

**Dra. L. Primawati Degodona, MSP dan Raju Pramana Ginting**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Desa Jinabun Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo serta faktor faktor yang mempengaruhinya untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukann secara wawancara serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Jinabun Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo sudah baik dan semua terlaksana sesuai dengan program pembangunan infrastruktur yang berdsarkan anggran dana desa , hal tersebut dilihat dari jumlah pembangunan yang terlaksana dari program program yang sudah direncanakan sebelumnya maka dari itu dengan terlaksananya pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Informan penelitian yaitu Kepala Desa Jinabun sebagai informan kunci , kaur pembangunan Desa Jinabun sebagai informan utama, dan beberapa masyarakat sebagai informan tambahan. Adapun faktor faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program infrastruktur pedesaan di Desa Jinabun Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo adalah Kondisi cuaca dan medan yang kurang mendukung untuk itu pemerintah desa jinabun mengkondisikan pelaksanaan program pembangunan itu dengan keadaan cuaca supaya proses pembangunan infrastruktur tidak terhambat dalam pengerjaannya.*

Kata kunci : Program, Pembangunan Infrastruktur Desa , Anggaran Dana Desa

**Latar Belakang Masalah**

Dalam penelitian ini Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandinganya akan lebih besar jumlah desa disbanding kota. Jumlah ibu kota

provinsi ,kota madya, dan kabupaten ,sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun tahun 2018 adalah 75.436 Desa.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Tetapi, desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2015). Sekarang ini regulasi

tentang desa telah diatur khusus terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governingcommunity* dan *local self government*. Berdasarkan Undang-Undang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas dan sempit). Hal itu ditunjukkan sesuai Data Sensus Penduduk pada tahun 2010 penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perdesaan yaitu sebesar 50,21 persen atau sebanyak 119 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia sebanyak 237 juta jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya prioritas utama dalam pembangunan perdesaan dan segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2015). Program yang dinilai memberikan dampak yang baik bagi pembangunan infrastruktur perdesaan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan secara terus menerus dilakukan perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan

produktivitas masyarakat desa sehingga dapat memecahkan masalah kemiskinan di desa.

Kewenangan tercermin dalam pasal 18 Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan merupakan program bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian perdesaan program infrastruktur perdesaan dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan

pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2019 prioritas dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Salah satu wujud instrument penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu program maka salah satu tolak ukur keberhasilan desa dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintahan Desa Jinabun Kec Kuta buluh Kab Karo dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan public yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Jinabun adalah infrastruktur pembangunan. Desa jinabun mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani sehingga Infrastruktur jalan pertanian yang layak adalah hal yang sangat penting bagi desa ini agar memudahkan masyarakat untuk mengakses jalan serta meningkatkan

produktivitas kerja mereka Pemerintah Desa Jinabun Kec Kuta Buluh Kab Karo memfokuskan pada pembukaan jalan usaha tani antara lain pembukaan jalan usaha tani sempagit ke rimo bunga, pembukaan jalan usaha tani lau kepeng ke buloh laga, pembukaan jalan tani lau buloh ke lau beski , pembukaan jalan usaha tani pusong pusong ke dendang, pembukaan jalan usaha tani semborat ke parihen , rabat beton jalan usaha tani baluren, rabat beton jalan usaha tani parihen, rabat beton jalan usaha tani martongah , rabat beton jalan usaha tani sempagit , rabat beton jalan usaha tani uncim. dimanasektor pertanian menjadi salah satu mata pencaharian namun begitu perlu adanya infrastruktur jalan yang memadai agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu pemerintah jinabun juga memfokuskan pembendungan air minum dimana desa ini masih menggunakan air minum pegunungan namun perlu adanya penampungan air yang besar untuk mencukupi kebutuhan air minum masyarakat. selanjutnya fokus program pembangunan pemerintah desa ini adalah pembangunan parit dimana desa ini tidak memiliki saluran air parit sehingga tidak teraturnya aliran air yang dapat menyebabkan genangan air dan sampah dimana mana bila terjadi hujan .Oleh karena itu sektor yang sudah dijelaskan diatas menjadi dasar yang kuat dalam pembangunan ekonomi masyarakat apabila program program diatas sudah terealisasi dengan baik maka dapat menunjang ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Faktor pendukung pelaksanaan PPIP di Desa Jinabun Kec Kuta Buluh yaitu segala hal yang membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa jinabun adalah Dana dan partisipasi masyarakat. Serta faktor penghambat yaitu segala hal

yang menghalangi pelaksanaan PPIP di desa jinabun kec kuta buluh adalah belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan masyarakat, cuaca dan medan, serta harga bahan material yang tidak menentu.

Anggaran desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan anggaran desa adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Pemerintah desa jinabun kec kutabuluh dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah jinabun adalah :

1. Pembukaan jalan usaha tani sempagit ke rimo bunga
2. Pembukaan jalan lingkar desa
3. pembukaan jalan usaha tani lau kepeng ke buloh laga
4. Pembukaan jalan tani lau buloh ke lau beski
5. Pembukaan jalan usaha tani pusongpusong ke dendang
6. Pembukaan jalan usaha tani semborat ke parihen
7. Rabat beton jalan usaha tani baluren
8. Rabat beton jalan usaha tani parihen I,II,III

9. Rabat beton jalan usaha tani urok martongah
10. Rabat beton jalan usaha tani sempagit
11. Rabat beton jalan usaha tani uncim
12. Pehapan rabat beton jalan usaha tani ulu lau
13. Pembangunan parit gereja Gpdi
14. Pembangunan parit rumah ander ke gedung umum
15. Pembangunan bendungan air sipara para.

Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa jinabun, kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah desa jinabun masa jabatan Kepala desa saat ini yaitu tahun 2018-2022. Maka dari itu, fokus penelitian adalah pelaksanaan pembagunan berdasarkan ADD tahun anggaran 2019. Adapun begitu masih ada program infrastruktur pedesaan yang belum terealisasi yaitu pembangunan bendungan air sipara para hal tersebut disebkan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan dana untuk pemabungunan infrastruktur di desa jinabun kec kuta buluh kab karo.

Berdasarkan latar belakang diatas, Terkait permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Desa Jinabun Kec Kuta Buluh Kab Karo Sumatera Utara."

**Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah program pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sesuai dengan anggaran dana desa TA 2019
2. pembangunan infrastruktur di desa jinabun ?

**Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penulisan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh penelitian. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian program pembangunan infrastruktur Desa Jinabun dengan anggaran dana desa TA 2019
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pembangunan infrastruktur Desa Jinabun.

**Landasan Teori**

**Konsep Pembangunan**

Pada lokus pemerintahan, menurut Sondang P Siagian “pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu : pertama, tentang administrasi dan kedua , tentang pembangunan. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modrenitas dalam rangka pembinaan bangsa”.kebijakan harus dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka pemerintah tidak punya arti apa-apa.Sementara subtransi dari kebijakan pemerintah adalah

membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh pemerintah secara bersama–sama dengan pihak rakyat yang dikuasi dan diatur dan atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.

Dalam proses perencanaan suatu pembangunan, diawali dengan kebijakan pembangunan. Pada kebijakan pembangunan haruslah menaati ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, dan seluruh rencana pemabangunan, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah.Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk ke dalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang.Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan pembangunan, terutama bukan karena orang tidak faham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit.

Pembangunan merupakan suatu proses berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap tahap yang disuatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari suatu bersifat tanpa akhir. pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih

dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural atautkah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga *stakeholders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional Adapun pendapat lain tentang pembangunan dikemukakan oleh Rogers, yakni sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

#### **Ciri-Ciri Pembangunan**

Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan delapan ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Nurman, yaitu:

1. "Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.

2. Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif yang setelah dikurangi laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan perkapita.
3. Suatu usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industry.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah.
6. Lebih menunjang kegiatan pembangunan.
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasarkan kemampuan sendiri atau nasional.
8. Suatu usaha terus-menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi".

#### **Pembangunan Desa**

Menurut Haw Widjaja "Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri". Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam mengelola pembangunan.

**Infrastruktur Desa**

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pedesaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi.

Ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu :

- 1) Jalan Desa
  - a. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan ataupun kabupaten).
  - b. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan makadam.

**Pembahasan**

Pada tahap ini dilakukan pembacaan ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, membaca pelan pelan dengan sangat teliti. Pada bagian bagian tertentu dari transkrip itu akan menemukan hal-hal penting ini, diambil "Kata Kunci". Dan Kata Kunci tersebut

akan diberikan kode. Berdasarkan hasil transkrip data maka dilakukan koding data yaitu membuat kata kunci berdasarkan kode sebagai berikut :

**Tabel Koding**

Kode	Kata Kunci
1	Pelaksanaan
2	Program Infrastruktur Desa
3	Anggaran Dana Desa

**Kategorisasi Data**

Pada tahap ini "menyederhanakan" hasil wawancara yang tertera dalam transkrip data.

**Tabel Kategorisasi Data**

NO	Kategori	Rincian isi kategori
1	Pelaksanaan	Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur
		Sumber daya manusia yang lumayan memadai
2	Program Infrastruktur Desa	Program infrastruktur desa sudah sesuai dengan anggaran dana desa
		Semua program program infrastruktur sudah terealisasi
		Program yang direncanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan tercapai sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
3	Anggaran Dana Desa	Seluruh kegiatan program pembangunan infrastruktur dibiayai oleh anggaran dana desa
		Dana desa sangat membantu program pembangunan infrastruktur desa
		Akuntabilitas biaya pembangunan yang di buat di Rencana kerja pemerintah desa

### **Triangulasi**

Triangulasi merupakan proses check dan recheck antara satu sumber data dengan data yang lain yang bersumber dari kepala desa ( 1orang ), kaur pembangunan ( 1 orang), masyarakat (4 orang )

#### **1) Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Jinabun Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo melibatkan masyarakat baik itu dalam bentuk gotong royong dana ada juga berpartisipasi untuk membantu proses pembangunan infrastruktur tersebut. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan usulan masyarakat , maupun program pembangunan infrastruktur berdasarkan anggaran dana desa tahun 2019. Serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur

#### **2) Program Infrastruktur Desa**

Seluruh Program infrastruktur desa baik mulai dari rabat beton jalan tani, pembangunan saluran parit dan pembangunan bendungan air minum sudah terealisasi dengan baik. Ini dikarenakan banyaknya dukungan dari pihak pihak masyarakat dalam prose pembangunan infrastruktur di desa jinabun kecamatan kutabuluh kabupaten karo disamping itu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah cukup baik karena kepala desa menampung seluruh aspirasi masyarakat atau usulan masyarakat pada tahun itu pemerintah memprioritaskan segala kebutuhan masyarakat demi kemajuan desa dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa

### **Anggran Dana Desa**

Anggran dana desa sangat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa jinabun karena dengan bantuan dana tersebut penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa menjadi terbantu. Dengan begitu pengelolaan anggran tersebut berguna dan bermanfaat bagi masyarakat karena di desa jinabun masyarakat membutuhkan infrastruktur yang layak guna kemajuan ekonomi mereka

### **Kesimpulan Sementara**

Setelah kategorisasi data, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sementara darihasil wawancara dengan kepala Desa, kaur pembangunan Desa ,dan Masyarakat Pemerintah desa jinabun sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunannya. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Jinabun adalah di bidang infrastruktur terutama rabat beton jalan usaha tani pembukaan jalan usaha tani pembangunan parit dan bendungan air minum. Hal tersebut berdasarkan keterangan kepala desa jinabun yang mengatakan bahwa perlunya perbaikan jalan untuk untuk kemudahan bagi petani dalam melakukan aktivitas serta pembangunan parit untuk saluran air dan pembangunan bendungan air untuk penampungan kesediaan air minum.Berdasarkan wawancara diatas fokus pembanunan di tahun 2019 Desa Jinabun adalah pembangunan di bidang infrastruktur jalan, parit dan bendungan. Kebutuhan pembangunan khususnya jalan merupakan masalah utama bagi masyarakat jinabun.

**Program Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan ADD**

Berdasarkan observasi penulis dari keseluruhan total jalan usaha tani yang ada di desa jinabun yakni dua belas jalan usaha tani yang kondisi jalan poros yang seluruhnya tanah dan berlubang sehingga kondisi ini masyarakat petani kesulitan dalam membawa hasil ladang mereka apalagi kondisi jarak desa sangat jauh ke area perladangan sehingga hal ini akan membuat ketidakefektifan penghasilan ekonomi masyarakat. Desa Jinabun memiliki beberapa program pada bidang pembangunan infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses masyarakat terhadap ekonomi.

Dalam proses pembangunan partisipasi masyarakat merupakan persyaratan utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan di desa. partisipasi

masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat berfungsi ganda yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Namun keterlibatan partisipasi masyarakat di desa Jinabun masih perlu ditingkatkan. Hal itu berdasar pada pernyataan kepala desa jinabun “tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan disini masih terbatas misalnya masih peran serta berperan secara luas mulai dari perencanaan program sampai evaluasi.

**Program Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Desa Jinabun Berdasarkan ADD 2019****Tabel Program Pembangunan Infrastruktur**

NO	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
1.	Pembukaan usaha tani sempagit ke rimo bunga	Januari - Desember	27,759,000	ADD
2.	Pembukaan jalan lingkaran desa	Januari – Desember	19,679,000	ADD
3.	Pembukaan jalan usaha tani lau kepeng ke buloh laga	Januari – Desember	19,759,000	ADD
4.	Pembukaan jalan usaha tani lau buloh ke lau beski	Januari – Desember	19,759,000	ADD
5.	Pembukaan jalan usaha tani pusong-pusong ke dendang	Januari – Desember	19,759,000	ADD
6.	Pembukaan jalan usaha tani semborat ke pariheh	Januari – Desember	19,759,000	ADD
7.	Rabat beton jalan usaha tani baluren	Januari – Desember	181,027,000	ADD
8.	Rabat beton jalan usaha tani pariheh	Januari – Desember	26,757,000	ADD
9.	Rabat beton jalan usaha tani urok martongah	Januari – Desember	67,316,000	ADD

10.	Rabat beton jalan usaha tani sempagit	Januari – Desember	45,939,000	ADD
11.	Rabat beton jalan usaha tani uncim	Januari – Desember	78,748,000	ADD
12.	Perehapan rabat beton jalan usaha tani ulu lau	Januari – Desember	6,449,000	ADD
13.	Pembangunan parit gereja Gpdi	Januari – Desember	37,213,000	ADD
14.	Pembangunan parit rumah ander ke gedung umum	Januari – Desember	37,213,000	ADD
15.	Pembendungan air sipara para	Januari – Desember	16.395.000	ADD
<b>Total</b>			<b>607,136,000</b>	

***Rab Desa Jinabun Tahun 2019***

Berdasarkan tabel diatas fokus pembangunan di Desa Jinabun adalah pembangunan dibidang infrastruktur jalan usaha tani. Pentingnya pembangunan infrastruktur jalan usaha tani bagi kemajuan suatu desa guna meningkatkan aksebilitas pembangunan di desa sehingga dinamika ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Fokus pembangunan di tahun 2019 yakni pembangunan infrastruktur pedesaan ungkap kepala desa Jinabun

Jadi fokus pelaksanaan program infrastruktur untuk tahun 2019 kemarin itu pembangunan infrastruktur terutama jalan usaha tani sebagai jalur transportasi masyarakat untuk ke area perkebunan mereka karena kondisi jalan mereka selama ini kurang baik banyak menghambat kelancaran aktivitas warga berkaitan dengan pekerjaan mereka yang sebagian besar tani. Jalan yang rusak membuat warga kesulitan untuk membawa hasil pertanian mereka, jadi kami harap pembangunan ini bisa membawa dampak baik bagi masyarakat.” Program pembangunan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dimana masyarakat berharap dengan perbaikan infrastruktur jalan

dapat memudahkan mereka untuk melakukan aktivitasnya, seperti di ungkap kepala desa jinabun “kebutuhan utama dikampung ini sudah pasti jalan, kondisi jalan yang sekarang sangat menghambat untuk melakukan aktivitas apalagi pada saat musim hujan itu sangat sulit membawa kendaraan jadi terpaksa warga berjalan kaki”.

Setelah program pembangunan desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan anggaran biayanya. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggran merupakan sebuah rencana yang sistematis dengan meliputi sumber dana dan pengalokasian dana keseluruhan kegiatan atau aktivitas dalam sebuah proyek beserta waktu yang dibutuhkan dana tersebut, dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain semua pembiayaan yang akan dikeluarkan dapat menunjang kegiatan atau aktivitas tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai, sebab pelaksanaan

pembangunan harus mengkondisikan dana yang tersedia. Pengelolaan program-program pembangunan desa dan mengandalkan partisipasi masyarakat juga. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Jinabun antaran lain bersumber dari Anggran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sumber lainnya.

#### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan program infrastruktur pedesaan berdasarkan anggran dana desa tahun 2019 desa jinabun kecamatan kuta buluh kabupaten karo dapat dikatakan sudah sesuai karena hal ini peneliti melihat data dan sekaligus wawancara langsung dengan informan informan yang berkaitan dengan program infrastruktur pedesaan sudah mencukupi terkait data yang di inginkan peneliti dan memang benar sudah sesuai. Anggaran dana desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk membangun infrastruktur pedesaan sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dalam pelaksanaan program infrastruktur pedesaan berdasarkan anggran dana desa sudah sesuai

Faktor penghambat seperti medan dan cuaca sangat mempengaruhi pembangunan untuk itu peran pemerintah melakukan pelaksanaan pembangunan ini padasaat cuaca mendukung dan memungkinkan untuk bekerja sehingga tidak ada halangan dan gangguan dalam proses pengerjaan dan pelaksanaan infrastruktur tersebut

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan anggran dana desa di Desa Jinabun Kecamatan Kuta

Buluh Kabupaten Karo maka penulis mengajukan saran bahwa untuk kedepanya pembangunan yang baik ini terus ditingkatkan dan mengutamakan kebutuhan rakyat serta melanjutkan pembangunan yang mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, Rahardjo, **Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, 2006

Cresweel John M, **Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed**, Pustaka Belajar, Yogyakarta 2013

Hikmat, Mahi M, **Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra**, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011

Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015

Rusyan H. A. Tabrani, **Membangun Keuangan Desa**, Bumi Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2018

Samosir Anton M, **Budgeting Perencanaan dan Pengendalian Laba**, Universitas HKBP Nommensen, Medan 1984

Siagian, Sondang P, **Administrasi Pembangunan**, CV. Haji Masagung, cetakan ke 13, Jakarta 1988

Surjadi, **Pembangunan Masyarakat Desa**, CV. Mandar Maju, Bandung, 1969

Tarigan Prof. Drs. Robinson, **Perencanaan Pembangunan Wilayah**, Bumi Aksara, Jakarta 2009